



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menyajikan data Pajak Bumi dan Bangunan di Kotamadya Jambi tahun 1986-1989 ke dalam bentuk peta dan mengetahui perkembangan penerimaan Negara dari Pajak Bumi dan Bangunan di Kotamadya Jambi.

Metode penggambaran peta menggunakan simbol titik kualitatif, simbol area kualitatif dan simbol diagram batang. Peta yang dihasilkan dengan skala 1: 25 000 yang meliputi: Peta Administrasi Kotamadya Jambi, dan Peta Penggunaan lahan Kotamadya Jambi tahun 1988. Peta Kelas Pajak Bumi Kotamadya Jambi, Peta Golongan dan Kelas Pajak Bangunan Kotamadya Jambi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1003/KMK.04/1985. Peta Jumlah Kepala Keluarga, Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kotamadya Jambi, jumlah KK, wajib pajak bumi dan bangunan Kotamadya Jambi tahun 1986-1989. Serta Peta Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1986-1989.

Dari peta-peta tersebut di atas dapat dianalisis secara geografis yang dilakukan dengan cara menumpang-tindihkan antara Peta Kelas Pajak Bumi Kotamadya Jambi dengan Peta Administrasi Kotamadya Jambi dan peta penggunaan lahan Kotamadya Jambi tahun 1988 dengan asumsi keadaan penggunaan lahan relatif sama dengan tahun 1989. Peta Golongan dan Kelas Pajak Bangunan Kotamadya Jambi dengan Peta Administrasi Kotamadya Jambi. Peta Penggunaan Lahan Kotamadya Jambi tahun 1988 dan Peta Kelas Pajak Bumi Kotamadya Jambi. Selanjutnya Peta Jumlah Kepala Keluarga, Wajib Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1986-1989 dan Peta Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kotamadya Jambi tahun 1986-1989 ditumpangtindihkan dengan Peta Administrasi Kotamadya Jambi, Peta Penggunaan Lahan Kotamadya Jambi tahun 1988, Peta Kelas Pajak Bumi Kotamadya Jambi, Peta Golongan dan Kelas Pajak Bangunan Kotamadya Jambi.

Hasil analisis dapat diketahui bahwa kelas Pajak Bumi yang ada di wilayah Kotamadya Jambi merupakan kelas menengah sampai dengan rendah. Golongan Bangunan C, D, E dan Kelas Pajak Bangunan yang tertinggi adalah C₁ dan kelas pajak bangunan yang terendah adalah E₄, diketahui adanya peningkatan jumlah KK dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di kelurahan-kelurahan dalam Kotamadya Jambi serta meningkatnya jumlah Realisasi Penerimaan Pemerintah Kotamadya Jambi dari pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya.